

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung.
- A.T, Salamun. 1991, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya cet.2*, Bina Rena Pariwara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basah, Sjacrhan. 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- . 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bohari, H. 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Eresco, Bandung.
- Harsono, Boedi. 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- HR, Ridwan. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardalis, 2006, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Muchsan. 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyawan, Iwan. 2010, *Panduan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Mustaqiem. 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT (Edisi Revisi)*, Karya Media, Yogyakarta.
- Pandiangan, Liberty. 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan berdasarkan UU Terbaru*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prawoto, Agus. 2011, *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan (edisi Pertama)*, BPFE-Yogyakarta.
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FHUII Press, Yogyakarta.
- Rudy, 2014, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Indept Publishing, Bandar Lampung.
- Ruchiyat, Eddy. 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Amico, Bandung.
- Siahaan, Marihot Pahalamana. 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, Edisi I ,Cetakan. I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen. 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Soemantri, R. Sri.1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 1990, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Sumardjono ,Maria SW. 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Sutedi, Adrian. 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Joko. 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya.
- Yosua Suhanan, dkk, 2013, *Hukum Pajak (Penerimaan, Kebijakan dan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas)*, In Media, Jakarta

Zulkarnain, dkk. 2006, *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik (Upaya Kolektif Berantas Korupsi)*, YAPPIKA, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Jurnal

Ispriyarso, Budi. *Aspek Perpajakan dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Adanya Transaksi Jual Beli*, Masalah-masalah Hukum., Volume 34 No. 4.

Marcus Lukman, 1996, Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta

Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, *Disertasi*, Universits Padjajaran, Bandung.

Sutawijaya Adrian. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tanah sebagai Dasar Penilaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)PBB di Kota Semarang*, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Kajian Ekonomi Negara Berkembang).

Internet

Rheyndiaz, http://rheyndiaz2.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-lembaga-peralihan-hak_12.html, diakses pada tanggal 06 Desember 2016.

Turiman Fachturahman Nur, *Konsep Diskresi Dalam Perspektif Hukum*, <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/10/konsep-diskresi-dalam-perspektif-hukum.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-verifikasi/>, diakses pada tanggal 06 Desember 2016.

<http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-diskresi.html>, diakses tanggal 15 Desember 2016.